



# **Sambutan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Selasa, 21 Maret 2023**



# Kerangka Paparan

**01**

Tantangan Pembangunan  
Global dan Nasional 2024

**02**

Rancangan RKP 2024

**Musyawarah  
Perencanaan  
Pembangunan Provinsi  
Sumatera Barat**

**03**

Pokok-Pokok Pikiran  
Pembangunan Provinsi  
Sumatera Barat



# Tantangan Pembangunan Global dan Nasional 2024



# PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2023

Potensi penurunan inflasi yang lebih cepat

Terjaganya daya beli sejalan dengan tingkat tabungan (*saving*) yang tinggi

Kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan aktivitas (*reopening*) Tiongkok pasca kebijakan Zero COVID Policy

**UPSIDE RISK**



**DOWNSIDE RISK**

Risiko tekanan inflasi yang persisten

Ekskalasi perang di Ukraina dan Fragmentasi geopolitik

Risiko perubahan harga di pasar keuangan

## Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 (%)



**2,9**

per Januari 2023



WORLD BANK GROUP

**1,7**

per Januari 2023



**2,2**

per November 2022

**Bloomberg**

**2,4**

per 13 Maret 2023



OXFORD ECONOMICS

**1,5**

per Februari 2023

**Keterangan:**

■ Meningkat dari proyeksi sebelumnya

■ Menurun dari proyeksi sebelumnya

■ Sama dengan proyeksi sebelumnya



# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2024

Ekonomi global 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik, didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2024

	IMF		WB		OECD
	OKT 22	JAN 23	JUN 22	JAN 23	NOV 22
<b>World</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
<b>Major Economies</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	
Amerika Serikat	1,2	1,0	2,0	1,6	1,0
Euro Area	1,8	1,6	1,9	1,6	1,4
Jepang	1,3	0,9	0,6	0,7	0,9
<b>Emerging Markets</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	
China	4,5	4,5	5,1	5,0	4,1
<b>Indonesia</b>	<b>5,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>
Thailand	3,6	3,6	3,9	3,7	
Malaysia	4,9	4,9	4,4	3,9	
Filipina	6,0	6,0	5,6	5,9	
Brazil	1,9	1,5	2,0	2,0	1,4
India	6,8	6,8	7,1	6,1	6,9

Sumber: WEO IMF Jan 2023, GEP WB Jan 2023, OECD Report Nov 2022



## Upside Risk



Perbaikan rantai pasok global yang sebelumnya terhambat akibat Geopolitik Rusia-Ukraina



Inflasi mengalami normalisasi seiring dengan respons bank sentral



## Downside Risk



Turunnya permintaan logam dan energi global dari Tiongkok



Dampak perubahan iklim menyebabkan disrupti rantai pasok global akibat krisis sumber daya



Geopolitik Rusia-Ukraina belum menemui titik akhir menyebabkan ketidakpastian yang berkelanjutan

Sumber: Global Economic Prospects, World Bank per Jan 2023



# SASARAN MAKRO EKONOMI INDONESIA TAHUN 2024

1

**Investasi dan Ekspor** perlu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan

## SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2024

### 5,3%-5,7%

**Peningkatan Produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur** sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi



**Pertumbuhan Investasi (PMTB)** 6,2% - 7,0%

6,2% - 7,0%



**Realisasi PMA dan PMDN** Rp1450 T – Rp1650 T

Rp1450 T – Rp1650 T

(Kementerian Investasi)



**Pertumbuhan Ekspor Non-Migas** 4,5% - 6,8%

4,5% - 6,8%

(Kementerian Perdagangan)



(PERSEN, YOY)



3,4% – 3,8%

**Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

(Kementerian Pertanian)



5,4% - 5,8%

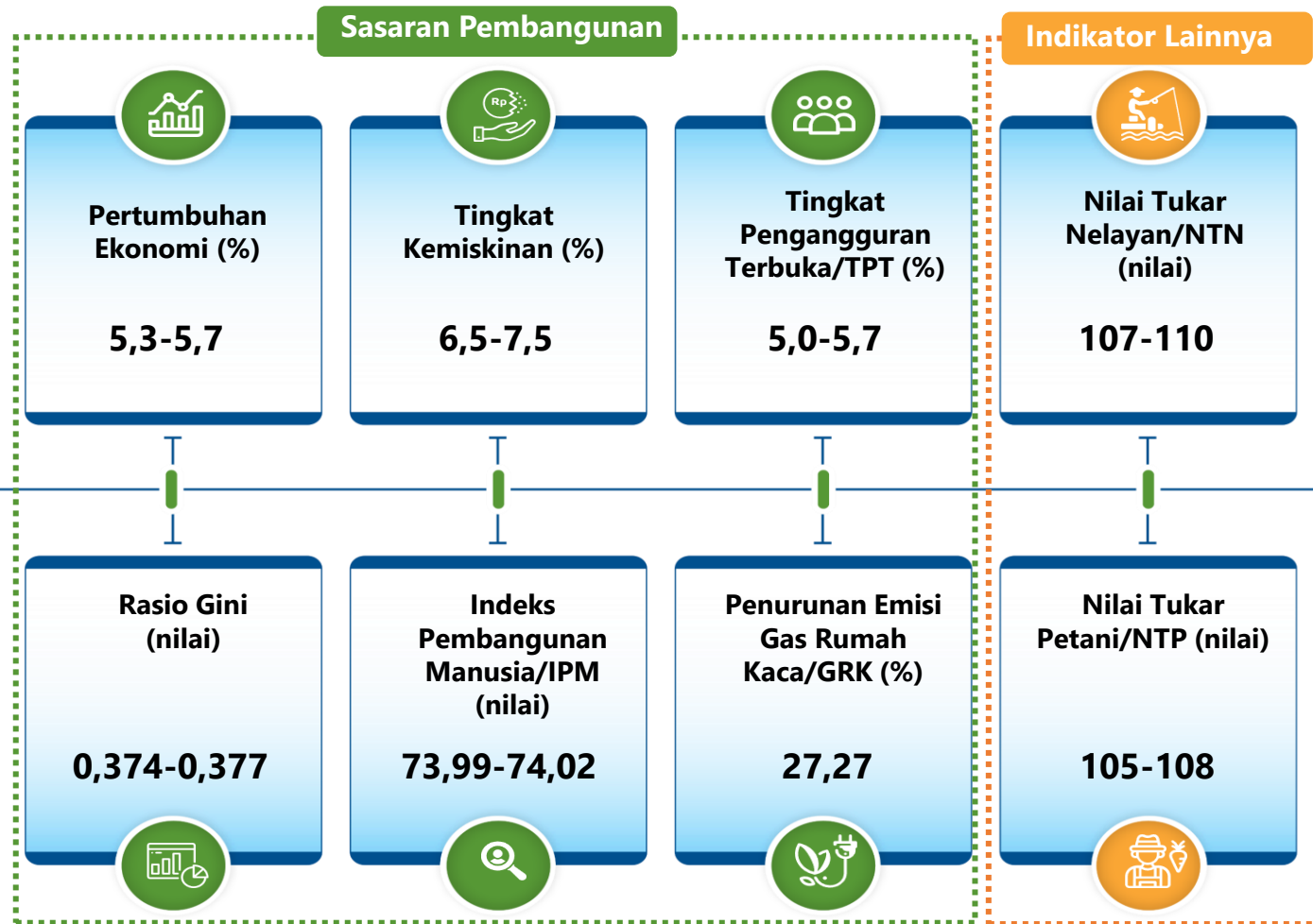
**Pertumbuhan Industri Manufaktur**

(Kementerian Perindustrian)

Sehingga *share*-Industri Manufaktur meningkat menjadi 19,5%-20,6%



# SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024



**Keterangan:**

Hasil exercise Bappenas Februari 2023 Rancangan Awal RKP 2024



# Rancangan RKP 2024



# TREN CAPAIAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

No.	Sasaran Pembangunan	Baseline (2019)	2022		Target 2023 (RKP) <sup>b)</sup>	Target 2024 (RPJMN) <sup>c)</sup>	Target 2024 (RKP) <sup>d)</sup>
			Target (RKP) <sup>a)</sup>	Capaian			
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,2-5,5	5,31	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,41	8,5-9,0	9,57	7,5-8,5	6,0-7,0	6,5-7,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,28	5,5-6,3	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
4.	Rasio Gini (nilai)	0,382	0,376-0,378	0,381	0,375-0,378	0,360-0,374	0,374-0,377
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	71,92	73,41-73,46	72,91	73,31-73,49	75,54	73,99-74,02
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	24,92	26,87	26,87	27,02	27,3	27,27
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	100,9	103-105	107,33	105-107	105	105-108
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	100,2	104-106	106,5	107-108	107	107-110

## Keterangan:

a) Perpres Nomor 115/2021 tentang Pemutakhiran RKP 2022

b) Perpres Nomor 134/2022 tentang Pemutakhiran RKP 2023

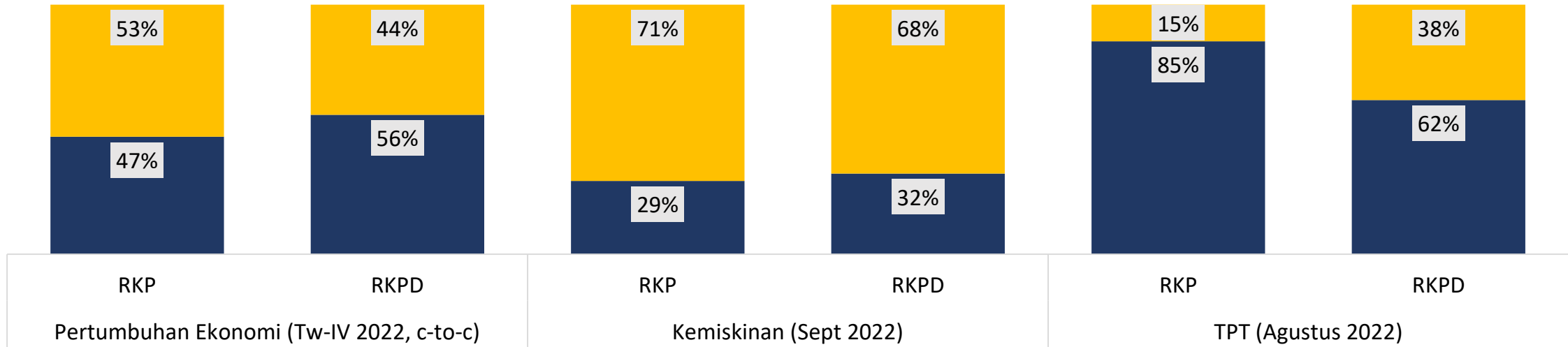
c) Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

d) Exercise Bappenas, Februari 2023

**Target RPJMN dilakukan penyesuaian melalui RKP 2024 dengan mempertimbangkan capaian dan kondisi terkini**



■ Tercapai ■ Belum tercapai



Keterangan:

Sumber data: hasil analisis EKPD, 2023

Sumber: Evaluasi Pembangunan Daerah, per triwulan IV-2022

Update per tanggal 22 Februari 2022

Target RKP merupakan target RKP Kewilayahan yang dijabarkan ke 34 provinsi

- Ketercapaian target RKPD Provinsi dan RKP Kewilayahan tahun 2022 masih cukup rendah kecuali untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini diduga karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang sangat berpengaruh terhadap rendahnya pencapaian target tersebut.
- Tingkat ketercapaian target RKP untuk tingkat pengangguran terbuka merupakan yang terbesar sementara tingkat ketercapaian target RKPD untuk tingkat kemiskinan masih cukup rendah.



## TEMA RKP Tahun 2024

### Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

#### PRIORITAS NASIONAL



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

#### ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024



Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem



Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan



Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan



Penguatan Daya Saing Usaha



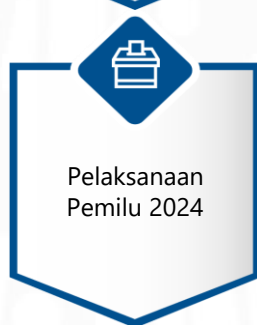
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi



Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas



Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara



Pelaksanaan Pemilu 2024

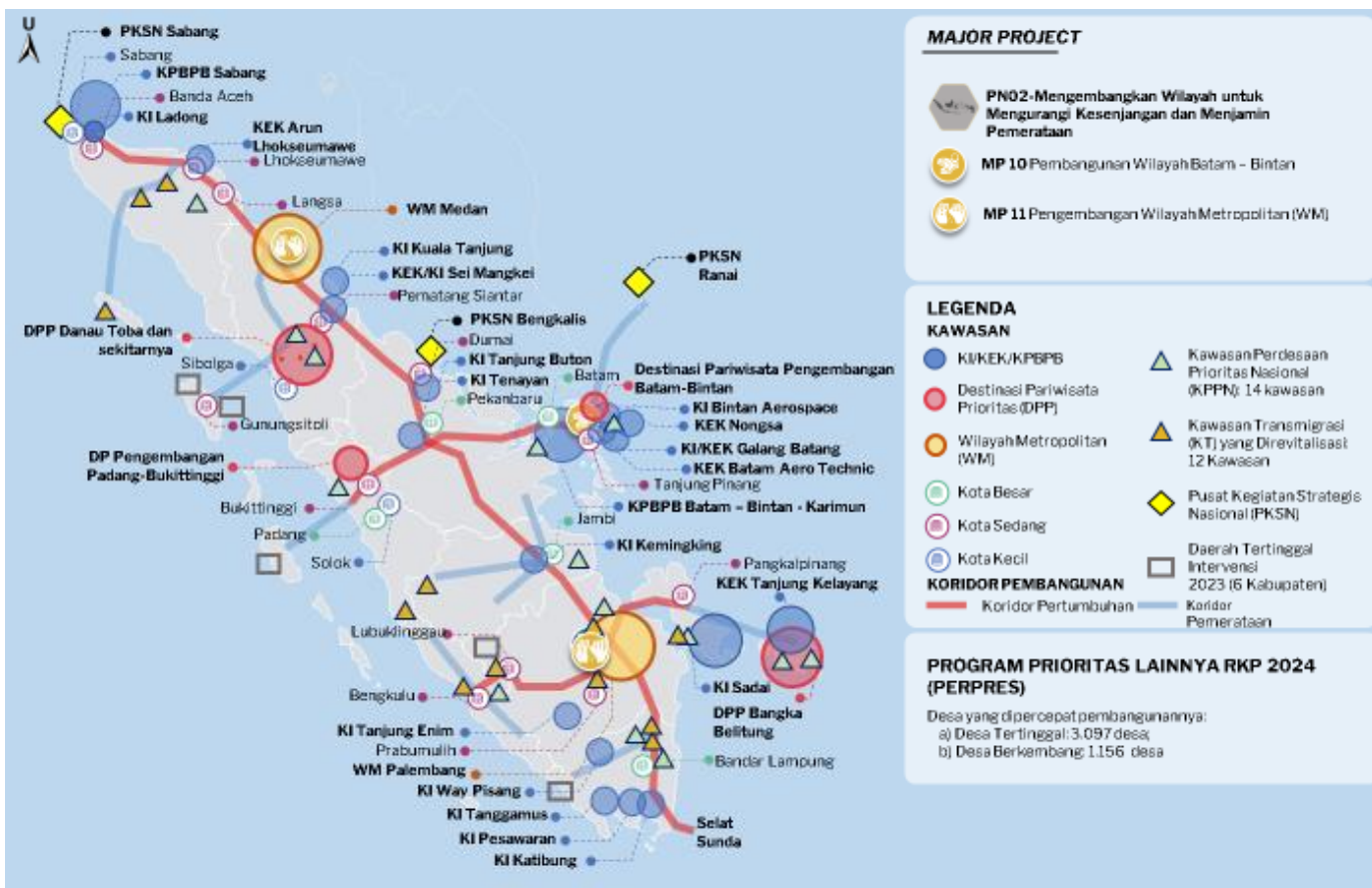
#### ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024 DILAKSANAKAN MELALUI MAJOR PROJECT antara lain:

- (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
- (2) Destinasi Pariwisata Prioritas
- (3) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
- (4) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
- (5) Pengelolaan Terpadu UMKM
- (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay,
- (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- (13) Transformasi Digital
- (14) Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)
- (15) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)
- (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3



# **Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**

## RANCANGAN PETA ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2024



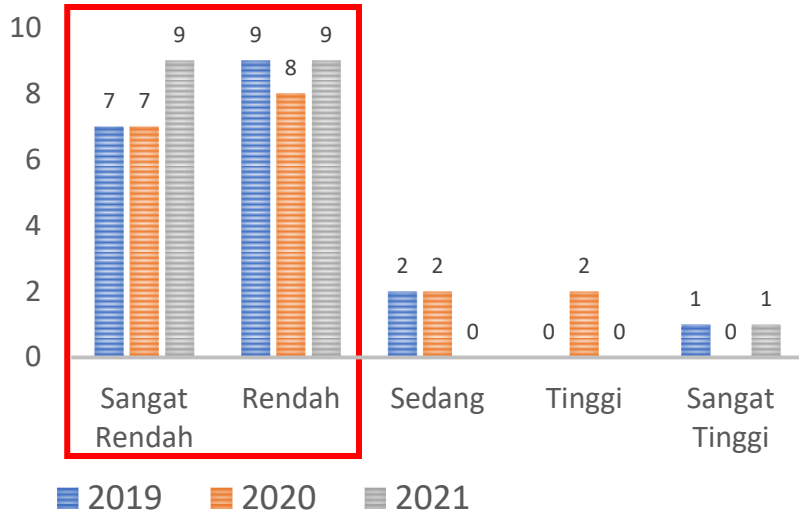
### RANCANGAN FOKUS KEGIATAN DAN LOKASI PRIORITAS

- Pengembangan Kawasan Strategis** yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe, KI Ladong, KPBPB Sabang, KI/KEK Sei Mangkei, KI Kuala Tanjung, KI Bintang Aerospace Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic Aero Technic (BAT), KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, serta KI Katibung
- Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan** yang difokuskan pada DPP Danau Toba dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi
- Pengembangan Komoditas Unggulan** akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas karet, kakao, kopi, kelapa, pala, lada, tebu, cengkeh, sawit, pengembangan perikanan budi daya dan perikanan tangkap
- Pengembangan Kawasan Perkotaan** yang difokuskan pada WM Medan dan WM Palembang, dan kota-kota lainnya
- Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi** yang difokuskan pada 3 PKSN, 12 Kawasan Transmigrasi, dan pembangunan 14 KPPN
- Pengembangan Keuangan dan Kelembagaan** difokuskan pada peningkatan capaian penerapan SPM daerah, peningkatan kompetensi SDM ASN, penguatan peran dan fungsi GWPP, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

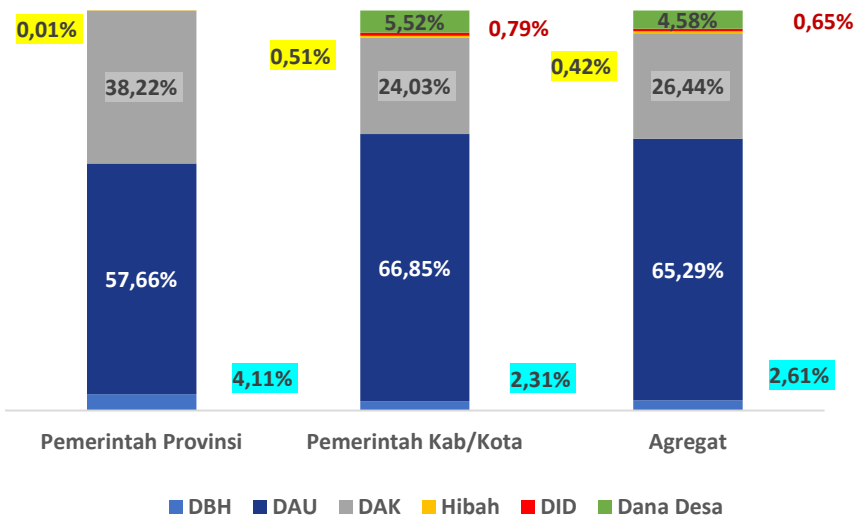


# POTRET KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## IKFD Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2019-2021)



## Alokasi TKD (Anggaran 2023)



## Pendapatan dan Belanja (2022)

Dalam Miliar Rupiah

Komponen Pndatan	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Agregat
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.613,76	2.735,93	5.349,69
Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	44,12%	13,59%	20,53%
Pendapatan Transfer	3.227,21	17.199,62	20.426,83
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	83,31	196,20	279,51
Pendapatan Daerah	1,41%	0,97%	1,07%
Pendapatan Daerah	5.924,28	20.131,75	26.056,03
Komponen Belanja	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Agregat
Belanja Operasi	4.170,81	16.094,07	20.264,88
Belanja Modal	67,22%	75,07%	73,31%
Belanja Tidak Terduga	953,28	3.400,28	4.353,56
Belanja Transfer	15,36%	15,86%	15,75%
Belanja Daerah	55,12	129,69	184,81
Belanja Daerah	1.025,07	1.815,93	2.841,00
Belanja Daerah	6.204,28	21.439,97	27.644,25
Proporsi	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Agregat
Fungsi Pelayanan Umum	34,04%	30,54%	31,32%
Fungsi Ketertiban dan Keamanan	0,21%	1,41%	1,14%
Fungsi Ekonomi	14,07%	11,96%	12,43%
Fungsi Lingkungan Hidup	0,20%	1,68%	1,34%
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum	2,55%	2,39%	2,42%
Fungsi Kesehatan	11,70%	17,60%	16,27%
Fungsi Pariwisata dan Budaya	0,34%	0,39%	0,38%
Fungsi Pendidikan	36,28%	33,59%	34,20%
Fungsi Perlindungan Sosial	0,62%	0,45%	0,49%

## Perlu Menjadi Perhatian

- Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori **Sedang**, namun mayoritas IKFD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera berada pada **kategori rendah dan sangat rendah** sepanjang tahun 2019 – 2021.
- Pendapatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh **dana Transfer ke Daerah (TKD)**.
- Secara Agregat **dana TKD terbesar** berasal dari komponen **Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa (DD)**.
- Belanja **Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota** masih didominasi oleh **Belanja Operasional (67% – 75%)** Proporsi **belanja modal** masih jauh **lebih kecil (15% – 16%)**.
- Belanja *mandatory spending* fungsi **pendidikan** telah mencapai **minimum 20%** dan untuk **belanja kesehatan** telah mencapai **minimum mandatory spending 10%** pada tahun 2022



# MAJOR PROJECTS PROVINSI SUMATERA BARAT



PN	Major Projects	Lokasi Pelaksanaan Kota/Kabupaten
1	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	Lokasi Proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) masih sampai level Provinsi
1	Industri 4.0 pada subsektor - subsektor industri prioritas	
1	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan
3	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	
3	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	514 kab/kota
3	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	514 kab/kota
3	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	514 Kab/Kota di Indonesia
5	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang
5	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang
5	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Kabupaten Kepulauan Mentawai
5	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	
5	Transformasi Digital	
5	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi
5	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	
5	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pasaman Barat
5	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Seluruh kota/kabupaten
6	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Seluruh kota/kabupaten



# TARGET INDIKATOR MAKRO DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2024



Laju  
Pertumbuhan  
Ekonomi (%)

5,0 – 5,4



Tingkat  
Pengangguran  
Terbuka (%)

5,03 – 5,73



Tingkat  
Kemiskinan  
(%)

4,00 – 4,50



Indeks  
Pembangunan  
Manusia

73,87 – 74,05



Rasio  
Gini

0,289 – 0,290

## Isu Strategis Daerah

Arah Kebijakan RKP 2024	Terdapatnya ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah	Layanan infrastruktur dasar masih terbatas dan belum menyeluruh	Daya saing, nilai tambah dan produktivitas UMKM dan kegiatan pariwisata relatif rendah	Daya saing, dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relatif rendah
Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>			
Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Penguatan Daya Saing Usaha			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi				
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		<input checked="" type="checkbox"/>		
Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara				
Pelaksanaan Pemilu 2024				

Arah Kebijakan RKP yang belum termuat: **Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi ; Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pelaksanaan Pemilu 2024**







# PERSEBARAN USULAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG PROSPEKTIF MASUK RKP 2024

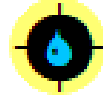



Sumber : Hasil Rakortekrenbang 2023



## USULAN DAERAH

-   **1** Peningkatan struktur ruas Jalan Surian - Padang Aro – Bts. Jambi
-   **2** Peningkatan struktur ruas jalan Ma. Kalaban - Tanah Bandantuang - Kiliran Jao Kab. Dharmasraya – Bts. Jambi

---



-   Peningkatan Daerah Irigasi Batang Batahan

---

-   Pengembangan Pelabuhan Simalepet Muara Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai (Pelabuhan Pengumpan Regional)

**Keterangan :** *Font Hitam* = Usulan Rakortekrenbang; *Font Underline* = *Major Project;*

## PRIORITAS NASIONAL

-  **PN 1**-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
-  **PN5**-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



## Arah Kebijakan RKP 2024

- Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
- Penguatan Daya Saing Usaha
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas



### Isu Strategis Daerah

### Rekomendasi Prioritas Daerah

Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah



Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan berstandar nasional

Layanan infrastruktur dasar masih terbatas dan belum menyeluruh



Peningkatan infrastruktur layanan dasar untuk pemerataan pembangunan.

Daya saing, nilai tambah dan produktivitas UMKM dan kegiatan pariwisata relatif rendah



Pengembangan ekowisata lokal melalui penguatan UMKM pendukung

Daya saing, dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relatif rendah



Hilirisasi sektor pertanian berbasis komoditas unggulan pertanian dan perkebunan



**TERIMA KASIH**